Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Halaman: 771 – 784

RESEARCH ARTICLE

Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam

Sri Rahayu Ningsih[1], Ade Fitria Susanti[2], Yusmaniar Ritonga[3], Rahmad Bidalo[4], Jamin[5], Tri Atmojo[6]
Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

journaljoecy@gmail.com

Kata Kunci:
Total Quality Management, Pendidikan Islam, Mutu Pendidikan, Perbaikan Berkelanjutan, Manajemen Pendidikan

Abstrak

Studi ini mengkaji penerapan Total Quality Management (TQM) sebagai suatu pendekatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah buku-buku dan artikel ilmiah yang relevan mengenai manajemen mutu, kepemimpinan pendidikan, perbaikan berkelanjutan, serta pendidikan Islam. Literatur yang ada dianalisis secara deskriptif dan tematis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, strategi penerapan, faktor pendukung, dan potensi tantangan. Sintesis hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan TQM memerlukan perencanaan mutu yang jelas, kepemimpinan yang berkomitmen, partisipasi staf, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi sistematis, dan perbaikan berkelanjutan. Di lembaga pendidikan Islam, prinsip-prinsip tersebut perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti sikap amanah, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan pengembangan moral. Keberhasilan penerapan TQM juga bergantung pada budaya organisasi, kompetensi pendidik, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta komunikasi yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan lembaga. TQM dapat menjadi kerangka kerja untuk memperkuat proses pendidikan dan akuntabilitas lembaga; namun, penerapannya harus disesuaikan dengan konteks masing-masing lembaga. Diperlukan penelitian empiris lebih lanjut untuk menilai efektivitas praktisnya dalam berbagai lingkungan pendidikan Islam yang berbeda.

Keyword:
Total Quality Management, Islamic Education, Educational Quality, Continuous Improvement, Educational Management

Abstract

This study examines the implementation of Total Quality Management (TQM) as an approach to improving educational quality in Islamic educational institutions. It employs a qualitative library research method by reviewing relevant books and scholarly articles on quality management, educational leadership, continuous improvement, and Islamic education. The literature is analyzed descriptively and thematically to identify key principles, implementation strategies, supporting factors, and potential challenges. The synthesis indicates that TQM implementation requires clear quality planning, committed leadership, staff participation, stakeholder involvement, systematic evaluation, and continuous improvement. In Islamic educational institutions, these principles should be integrated with Islamic values, including trustworthiness, responsibility, discipline, cooperation, and moral development. Effective implementation also depends on organizational culture, educator competence, adequate resources, and constructive communication among institutional stakeholders. TQM can provide a framework for strengthening educational processes and institutional accountability; however, its implementation must be adapted to each institution's context. Further empirical research is needed to assess its practical effectiveness across different Islamic educational settings.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga berdasarkan pembentukan akhlak, penguatan nilai-nilai keislaman, serta pengembangan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam, perlu mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan yang mampu menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan berkelanjutan. Tantangan tersebut menuntut lembaga pendidikan untuk tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, tetapi juga memperhatikan kualitas kepemimpinan, kompetensi tenaga pendidik, tata kelola kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kepuasan pemangku kepentingan. Sallis (2002) menjelaskan bahwa manajemen mutu terpadu atau *Total Quality Management* (TQM) dapat digunakan sebagai pendekatan manajemen untuk membangun budaya mutu melalui kepemimpinan, kerja sama, pengukuran kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Mutu pendidikan pada dasarnya merupakan konsep multidimensional yang mencakup kualitas proses pembelajaran, kompetensi lulusan, profesionalitas tenaga pendidik, efektivitas pengelolaan lembaga, serta kemampuan institusi dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Mutu tidak cukup dipahami sebagai pencapaian nilai akademik yang tinggi atau keberhasilan peserta didik dalam memperoleh prestasi tertentu, melainkan perlu dilihat dari kesesuaian antara tujuan pendidikan, proses penyelenggaraan, dan hasil yang dicapai. Dalam lembaga pendidikan Islam, dimensi mutu tersebut perlu dipadukan dengan pembentukan karakter, internalisasi nilai-nilai agama, dan pengembangan budaya akademik yang bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan mutu membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu menetapkan standar, mengukur pencapaian, mengidentifikasi kesenjangan, serta menyusun langkah perbaikan berdasarkan kebutuhan nyata. Sallis (2002) menekankan pentingnya pemahaman terhadap mutu dalam konteks pendidikan, termasuk keterlibatan seluruh unsur organisasi dan penggunaan mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan perlu diperlakukan sebagai tanggung jawab institusional, bukan semata-mata sebagai kewajiban guru atau pimpinan lembaga.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan mutu pendidikan adalah Manajemen Mutu Terpadu (MMT), yang dikenal secara internasional sebagai *Total Quality Management* (TQM). MMT merupakan pendekatan manajemen yang menempatkan mutu sebagai orientasi utama dalam seluruh aktivitas organisasi melalui keterlibatan semua anggota, kepemimpinan yang berkomitmen, pengambilan keputusan berdasarkan informasi, serta perbaikan proses secara terus-menerus. Dalam penerapannya pada lembaga pendidikan, MMT mengarahkan setiap unsur organisasi untuk bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan mutu yang telah disepakati. Artinya, peningkatan mutu tidak cukup dilakukan melalui perubahan kurikulum atau penambahan fasilitas, tetapi juga memerlukan pembenahan prosedur kerja, penguatan komunikasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program. Solikhin dan Suwadi (2022) mengkaji konsep manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan Islam dan menempatkan penerapannya sebagai salah satu pendekatan untuk membangun lembaga pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan itu, Zohriah et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan TQM dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan upaya mencapai standar mutu melalui perbaikan berkelanjutan pada aspek fisik maupun nonfisik. Kedua kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami MMT sebagai sistem pengelolaan yang mengintegrasikan berbagai unsur organisasi dalam peningkatan mutu pendidikan.

Penerapan MMT pada lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri karena tujuan peningkatan mutu perlu diselaraskan dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan Islam. Prinsip orientasi pada pengguna layanan, misalnya, dapat diterapkan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, harapan orang tua, tuntutan masyarakat, serta standar pendidikan yang berlaku, tanpa mengabaikan visi keislaman lembaga. Prinsip keterlibatan seluruh anggota organisasi dapat diwujudkan melalui kerja sama antara kepala madrasah atau pimpinan pesantren, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, komite, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Sementara itu, prinsip perbaikan berkelanjutan dapat dikembangkan melalui evaluasi pembelajaran, pembinaan akhlak, peningkatan kompetensi pendidik, pembenahan administrasi, serta peninjauan kembali program pendidikan berdasarkan hasil evaluasi. Siregar (2024) mengemukakan bahwa pengembangan manajemen mutu terpadu pada lembaga pendidikan Islam perlu memperhatikan pemanfaatan seluruh potensi organisasi dan menghadapi tantangan budaya kerja serta kinerja sumber daya manusia. Sementara itu, kajian Latifah (2024) mengenai penerapan TQM di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin menunjukkan relevansi komitmen pimpinan, pelatihan tenaga pengajar, dan keterlibatan unsur pesantren dalam pelaksanaan manajemen mutu. Hal tersebut menegaskan bahwa penerapan MMT perlu mempertimbangkan karakteristik kelembagaan dan membangun kesesuaian antara sistem manajemen modern dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

Meskipun menawarkan kerangka pengelolaan yang sistematis, implementasi MMT tidak terlepas dari berbagai tantangan. Lembaga pendidikan Islam dapat menghadapi keterbatasan anggaran, fasilitas pembelajaran yang belum memadai, perbedaan kompetensi tenaga pendidik, lemahnya koordinasi antarbagian, serta belum optimalnya penggunaan data dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan lainnya adalah kemungkinan munculnya pemahaman bahwa peningkatan mutu hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen administrasi atau pencapaian indikator formal, bukan perubahan nyata dalam proses pembelajaran dan layanan pendidikan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program peningkatan mutu berlangsung secara administratif tanpa diikuti pembentukan budaya mutu yang konsisten. Siregar (2024) mengidentifikasi budaya kerja dan kinerja sumber daya manusia sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan manajemen mutu terpadu pada lembaga pendidikan Islam. Latifah (2024) juga menguraikan tantangan berupa keterbatasan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

sumber daya dan resistensi terhadap perubahan dalam penerapan TQM di lingkungan pesantren. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi MMT tidak cukup ditentukan oleh keberadaan kebijakan atau dokumen standar, tetapi juga bergantung pada komitmen pimpinan, kesiapan organisasi, kemampuan mengelola perubahan, dan partisipasi aktif seluruh warga lembaga pendidikan.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, implementasi MMT perlu dilaksanakan melalui tahapan manajemen yang terencana dan dapat dievaluasi. Tahap awal mencakup identifikasi kondisi mutu lembaga melalui analisis kebutuhan, pemetaan sumber daya, peninjauan hasil pembelajaran, serta pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar untuk menetapkan standar dan prioritas peningkatan mutu yang realistis, terukur, serta selaras dengan visi dan misi lembaga. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan program melalui pembagian tanggung jawab, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan dukungan pembelajaran, penguatan komunikasi, dan pelibatan seluruh unsur organisasi. Pelaksanaan tersebut perlu disertai pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan hasil, mengidentifikasi kendala, serta menentukan tindakan korektif. Tripitasari et al. (2023) membahas peningkatan manajemen mutu terpadu pada lembaga pendidikan Islam, sedangkan Zohriah et al. (2023) menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan yang mengacu pada standar mutu lembaga. Berdasarkan perspektif tersebut, siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dapat digunakan sebagai kerangka operasional untuk memastikan bahwa peningkatan mutu tidak berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi.

Keberhasilan penerapan MMT selanjutnya perlu dinilai melalui indikator yang mencerminkan perubahan pada proses maupun hasil penyelenggaraan pendidikan. Indikator tersebut dapat mencakup peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran, kedisiplinan dan kompetensi tenaga pendidik, ketercapaian hasil belajar, perkembangan karakter peserta didik, efektivitas administrasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta kepuasan peserta didik dan orang tua terhadap layanan pendidikan. Penilaian juga perlu mempertimbangkan apakah program peningkatan mutu mampu membentuk budaya kerja yang kolaboratif, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kemampuan lembaga dalam menindaklanjuti temuan evaluasi. Dalam lembaga pendidikan Islam, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan penilaian terhadap keterpaduan kegiatan akademik dan pembinaan nilai-nilai keislaman sesuai dengan tujuan institusi. Sallis (2002) menempatkan pengukuran, evaluasi, kerja sama, dan pengembangan organisasi sebagai unsur penting dalam kerangka manajemen mutu di bidang pendidikan. Sementara itu, Solikhin dan Suwadi (2022) memberikan perspektif mengenai penerapan konsep manajemen mutu terpadu dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam. Dengan demikian, evaluasi implementasi MMT sebaiknya tidak hanya berorientasi pada capaian kuantitatif, tetapi juga memperhatikan kualitas proses, konsistensi pelaksanaan, dan keberlanjutan perbaikan yang dilakukan lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, Manajemen Mutu Terpadu memiliki relevansi sebagai pendekatan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. Namun, implementasinya membutuhkan penyesuaian terhadap karakteristik lembaga, komitmen kepemimpinan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, standar mutu yang jelas, serta evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kajian mengenai MMT perlu diarahkan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip manajemen mutu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik kelembagaan, aspek apa saja yang mendukung peningkatan mutu, serta kendala apa yang dapat menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada analisis implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, dengan memperhatikan perencanaan mutu, pelaksanaan program, keterlibatan sumber daya manusia, mekanisme evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian manajemen pendidikan Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pimpinan lembaga pendidikan dalam membangun sistem pengelolaan mutu yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen mutu, bentuk implementasi, faktor pendukung, kendala pelaksanaan, serta strategi peningkatan mutu pendidikan yang relevan dengan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

karakteristik lembaga pendidikan Islam. Snyder (2019) menjelaskan bahwa kajian literatur dapat digunakan sebagai metodologi penelitian untuk mengintegrasikan pengetahuan yang telah tersedia, mengidentifikasi perkembangan suatu bidang kajian, dan menemukan kesenjangan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber primer berupa artikel penelitian ilmiah yang secara langsung membahas Manajemen Mutu Terpadu, manajemen pendidikan Islam, dan peningkatan mutu lembaga pendidikan. Sumber sekunder meliputi buku akademik, artikel konseptual, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dengan prinsip TQM, kepemimpinan pendidikan, budaya mutu, evaluasi kelembagaan, dan perbaikan berkelanjutan. Literatur diperoleh melalui penelusuran basis data dan portal publikasi ilmiah, seperti Google Scholar, Crossref, serta laman jurnal ilmiah yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian topik, kejelasan identitas publikasi, relevansi terhadap fokus penelitian, dan ketersediaan informasi yang dapat diperiksa. Snyder (2019) menegaskan bahwa kajian literatur yang berkualitas memerlukan strategi penelusuran, kriteria pemilihan sumber, serta proses analisis yang dijelaskan secara transparan agar hasil sintesis dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menghimpun, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber tertulis. Proses pengumpulan data diawali dengan penentuan kata kunci, seperti Manajemen Mutu Terpadu, Total Quality Management in Islamic Education, mutu pendidikan Islam, quality management in Islamic educational institutions, dan continuous quality improvement. Selanjutnya, sumber yang ditemukan ditelaah berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, serta isi lengkap apabila tersedia untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Literatur yang membahas implementasi TQM, perencanaan mutu, kepemimpinan, keterlibatan tenaga pendidik, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan diprioritaskan untuk dianalisis. Sumber yang tidak relevan dengan rumusan masalah, tidak memiliki informasi bibliografis yang memadai, atau tidak menyediakan informasi yang dapat diverifikasi tidak digunakan sebagai dasar utama analisis. Prosedur tersebut mengacu pada prinsip kajian literatur yang menekankan ketepatan pemilihan sumber, kesesuaian metodologi, dan transparansi proses penelaahan (Snyder, 2019).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, pengelompokan informasi, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan informasi yang relevan dipertahankan. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, meliputi konsep dan prinsip MMT, perencanaan peningkatan mutu, implementasi program, keterlibatan sumber daya manusia, evaluasi mutu, faktor pendukung, hambatan, dan strategi perbaikan berkelanjutan. Informasi dari berbagai sumber kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, pola pemikiran, dan implikasi penerapan MMT pada lembaga pendidikan Islam. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk membangun pemahaman yang sistematis mengenai hubungan antara prinsip manajemen mutu dan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Penggunaan prosedur analisis yang jelas diperlukan agar kajian literatur tidak hanya menjadi rangkuman publikasi, tetapi menghasilkan sintesis pengetahuan yang bermakna (Snyder, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Islam

Berdasarkan sintesis literatur yang relevan, Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau *Total Quality Management* (TQM) dapat dipahami sebagai pendekatan pengelolaan lembaga pendidikan yang menempatkan mutu sebagai tanggung jawab seluruh unsur organisasi. Pendekatan ini menekankan keterlibatan pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Mutu tidak hanya dilihat dari hasil belajar peserta didik, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran, efektivitas administrasi, profesionalitas tenaga pendidik, pelayanan pendidikan, dan kemampuan lembaga melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Tripitasari et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan MMT pada lembaga pendidikan Islam menekankan pentingnya kerja sama, pemberdayaan tenaga kerja, dan keterlibatan kelompok dalam mencapai tujuan peningkatan mutu. Kerja sama tersebut memungkinkan setiap anggota organisasi memahami tanggung jawabnya sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Sementara itu, Zohriah et al. (2024) menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan yang mengacu pada standar mutu lembaga pendidikan. Dengan demikian, MMT tidak cukup diterapkan sebagai kebijakan administratif, tetapi perlu dikembangkan menjadi budaya organisasi yang tercermin dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan lembaga sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan Islam, prinsip manajemen mutu juga perlu diselaraskan dengan tujuan pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak, dan memiliki tanggung jawab sosial. Artinya, keberhasilan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

lembaga tidak hanya diukur melalui prestasi akademik atau kepuasan pengguna layanan, tetapi juga melalui keberhasilan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Syarifah (2020) menjelaskan bahwa penerapan TQM di pesantren berkaitan dengan orientasi mutu, kepuasan pemangku kepentingan, serta penggunaan pendekatan pemecahan masalah yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 1. Konsep Dasar Manajemen Mutu Terpadu pada Lembaga Pendidikan Islam

No.	Prinsip MMT	Bentuk Penerapan	Kontribusi terhadap Mutu Pendidikan
1	Fokus pada penerima layanan	Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, orang tua, dan masyarakat	Meningkatkan relevansi dan kualitas layanan pendidikan
2	Kepemimpinan yang berkomitmen	Menetapkan visi mutu, sasaran, kebijakan, dan pembagian tanggung jawab	Memberikan arah yang jelas bagi program peningkatan mutu
3	Keterlibatan seluruh anggota	Melibatkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua	Mendorong kolaborasi dan tanggung jawab bersama
4	Pendekatan berbasis proses	Menetapkan prosedur pembelajaran, administrasi, dan evaluasi	Meningkatkan konsistensi pelaksanaan kegiatan
5	Perbaikan berkelanjutan	Melakukan evaluasi, mengidentifikasi masalah, dan menindaklanjuti temuan	Menjaga peningkatan mutu secara sistematis
6	Pengambilan keputusan berbasis data	Menggunakan hasil belajar, evaluasi program, dan umpan balik	Membantu menentukan prioritas perbaikan secara objektif
7	Integrasi nilai-nilai Islam	Menanamkan amanah, tanggung jawab, kejujuran, dan akhlak dalam tata kelola	Mengintegrasikan kualitas akademik dengan pembentukan karakter

Sumber: Sintesis konseptual berdasarkan Sallis (2002), Syarifah (2020), Tripitasari et al. (2023), dan Zohriah et al. (2024).

Tabel 1 menunjukkan bahwa prinsip MMT saling berkaitan dan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Kepemimpinan, misalnya, berperan menetapkan arah peningkatan mutu, sedangkan keterlibatan seluruh anggota diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi praktik nyata. Selanjutnya, pendekatan berbasis proses dan penggunaan data membantu lembaga mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan telah mencapai sasaran. Integrasi nilai-nilai Islam menjadi karakter pembeda yang mengarahkan seluruh proses pengelolaan agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pencapaian target, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan pembentukan akhlak.

Dengan demikian, penerapan MMT dalam pendidikan Islam perlu menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu kualitas pengelolaan organisasi, kualitas layanan dan pembelajaran, serta kualitas pembentukan karakter. Ketiga dimensi tersebut menjadi landasan untuk mengembangkan sistem mutu yang menyeluruh dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam

Implementasi MMT memerlukan proses yang terencana agar prinsip-prinsip mutu dapat diterjemahkan menjadi program yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Berdasarkan sintesis literatur, penerapan MMT dapat dikelompokkan ke dalam empat tahap utama, yaitu perencanaan mutu, pelaksanaan program, evaluasi mutu, dan tindak lanjut perbaikan. Tahapan tersebut merupakan kerangka analitis yang disusun untuk menjelaskan penerapan MMT dalam konteks pendidikan Islam, bukan hasil pengukuran terhadap satu lembaga tertentu.

Syarifah (2020) menunjukkan bahwa penerapan TQM di pesantren berorientasi pada mutu dan kepuasan pemangku kepentingan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Tripitasari et al. (2023) menekankan kerja sama dan pemberdayaan anggota organisasi sebagai bagian dari peningkatan mutu. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan hubungan yang erat antara perencanaan, pelaksanaan, keterlibatan sumber daya manusia, dan evaluasi.

Tabel 2. Tahapan Implementasi Manajemen Mutu Terpadu

No.	Tahapan	Kegiatan Utama	Pihak yang Terlibat	Indikator Evaluasi
1	Perencanaan mutu	Analisis kebutuhan, pemetaan kondisi, penetapan standar, dan penyusunan program	Kepala madrasah atau pimpinan pesantren, guru, tenaga kependidikan, dan komite	Tersedianya sasaran mutu yang jelas dan terukur
2	Pelaksanaan program	Peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan pembenahan layanan	Pimpinan, guru, tenaga kependidikan, dan unit terkait	Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

3	Pemantauan dan evaluasi	Pemeriksaan hasil belajar, evaluasi layanan, dan pengumpulan umpan balik	Tim penjaminan mutu, pimpinan, guru, dan pemangku kepentingan	Tersedianya data tentang capaian dan kendala
4	Tindak lanjut	Perbaikan program, pembinaan personel, dan penyesuaian prosedur	Pimpinan dan seluruh unit terkait	Terlaksananya tindakan korektif dan pencegahan
5	Pengembangan berkelanjutan	Peninjauan sasaran mutu dan pengembangan inovasi pendidikan	Seluruh warga lembaga pendidikan	Adanya evaluasi dan pembaruan program secara berkala

Sumber: Sintesis berdasarkan Sallis (2002), Snyder (2019), Syarifah (2020), dan Tripitasari et al. (2023).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa implementasi MMT perlu berlangsung sebagai siklus, bukan sebagai kegiatan yang berhenti setelah program selesai dilaksanakan. Pada tahap perencanaan, lembaga perlu menentukan permasalahan yang menjadi prioritas berdasarkan kondisi aktual. Sebagai contoh, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik belum mencapai target, lembaga dapat menetapkan program peningkatan kompetensi guru, pengembangan kegiatan membaca, dan pemantauan perkembangan belajar.

Pada tahap pelaksanaan, setiap program perlu disertai pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pimpinan berperan menyediakan arahan dan dukungan, sedangkan guru melaksanakan strategi pembelajaran dan mengevaluasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya, hasil pelaksanaan ditinjau untuk mengetahui apakah program memberikan hasil sesuai dengan sasaran. Jika hasilnya belum memadai, lembaga perlu mengidentifikasi penyebabnya dan menyusun tindakan perbaikan yang relevan.

Snyder (2019) menegaskan bahwa sintesis literatur yang berkualitas memerlukan prosedur analisis yang jelas dan transparan. Prinsip transparansi tersebut juga relevan ketika lembaga pendidikan mengevaluasi pelaksanaan program mutu, karena keputusan perbaikan sebaiknya didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa, bukan sekadar asumsi. Oleh karena itu, dokumentasi program, hasil evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

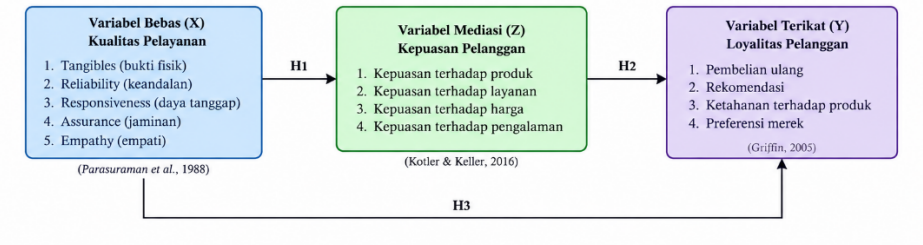

Gambar 1. Model Siklus Implementasi MMT pada Lembaga Pendidikan Islam

Sumber: Model konseptual yang dikembangkan berdasarkan prinsip MMT dalam Sallis (2002) dan sintesis literatur pendidikan Islam.

Gambar 1 menggambarkan bahwa implementasi MMT berlangsung melalui siklus yang saling berhubungan. Perencanaan menentukan sasaran yang ingin dicapai, pelaksanaan menerjemahkan sasaran menjadi kegiatan nyata, dan evaluasi memberikan informasi mengenai keberhasilan serta kendala yang ditemukan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi tindakan korektif dan pengembangan program selanjutnya.

Model ini juga memperlihatkan bahwa perbaikan berkelanjutan bukan sekadar tahap akhir, melainkan prinsip yang mendasari seluruh proses. Ketika lembaga menemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, hasil evaluasi perlu digunakan untuk memperbaiki perencanaan berikutnya. Dengan demikian, sistem MMT dapat membantu lembaga pendidikan Islam mengembangkan budaya evaluasi dan perbaikan yang lebih konsisten.

Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi MMT karena pimpinan bertanggung jawab mengarahkan kebijakan, mengoordinasikan sumber daya, dan membangun komitmen terhadap mutu. Dalam lembaga pendidikan Islam, kepala madrasah atau pimpinan pesantren tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan teladan dalam pelaksanaan nilai-nilai keislaman.

Sallis (2002) menempatkan kepemimpinan dan komitmen organisasi sebagai bagian penting dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan. Pemimpin perlu memastikan bahwa sasaran mutu dipahami oleh

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

seluruh anggota organisasi dan diterjemahkan ke dalam kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pimpinan perlu menyediakan ruang komunikasi agar guru dan tenaga kependidikan dapat menyampaikan kendala serta mengusulkan perbaikan berdasarkan pengalaman pelaksanaan tugas.

Tabel 3. Peran Kepemimpinan dalam Implementasi MMT

No.	Aspek Kepemimpinan	Bentuk Implementasi	Dampak yang Diharapkan
1	Penetapan visi mutu	Menetapkan sasaran peningkatan mutu yang selaras dengan visi lembaga	Arah pengembangan lembaga menjadi lebih jelas
2	Keteladanan	Menunjukkan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi	Terbentuknya budaya kerja yang positif
3	Pemberdayaan tenaga pendidik	Memberikan pelatihan, pendampingan, dan kesempatan berinovasi	Peningkatan kompetensi dan partisipasi guru
4	Koordinasi organisasi	Mengadakan rapat evaluasi dan memperjelas pembagian tugas	Peningkatan koordinasi dan efektivitas kerja
5	Pengambilan keputusan	Menggunakan hasil evaluasi dan masukan pemangku kepentingan	Keputusan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
6	Pengawasan dan tindak lanjut	Memantau program dan memastikan rekomendasi evaluasi dilaksanakan	Perbaikan program lebih konsisten

Sumber: Sintesis berdasarkan Sallis (2002), Tripitasari et al. (2023), dan Zohriah et al. (2024).

Berdasarkan Tabel 3, kepemimpinan yang mendukung MMT perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Pimpinan, misalnya, dapat menyelenggarakan evaluasi rutin terhadap program pembelajaran, memfasilitasi pengembangan profesional guru, serta memastikan bahwa setiap unit memiliki sasaran dan indikator kerja yang jelas. Dalam pengelolaan pesantren, prinsip tersebut juga dapat diterapkan pada pengelolaan kegiatan pembelajaran agama, pembinaan akhlak, pengembangan keterampilan, dan pelayanan kepada orang tua santri.

Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu juga perlu menghindari pengambilan keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi pelaksanaan program. Keterlibatan guru dan tenaga kependidikan diperlukan karena mereka memiliki informasi langsung mengenai proses pembelajaran dan kendala operasional. Melalui komunikasi dua arah, pimpinan dapat memahami kebutuhan organisasi secara lebih menyeluruh sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab anggota terhadap keberhasilan program.

Dengan demikian, kepemimpinan dalam MMT bukan hanya berkaitan dengan kewenangan formal, melainkan kemampuan membangun visi bersama, menggerakkan partisipasi, dan memastikan bahwa kebijakan mutu benar-benar dilaksanakan serta dievaluasi.

Keterlibatan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Implementasi MMT membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi karena mutu pendidikan terbentuk melalui hubungan antara berbagai proses dan layanan. Guru bertanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran, tenaga kependidikan mendukung kelancaran administrasi, pimpinan mengoordinasikan kebijakan, sedangkan orang tua dan masyarakat berperan memberikan dukungan serta umpan balik. Apabila masing-masing unsur bekerja tanpa koordinasi, program peningkatan mutu berisiko berjalan secara terpisah dan tidak menghasilkan perubahan yang konsisten.

Tripitasari et al. (2023) menekankan pentingnya kerja sama dan pemberdayaan anggota organisasi dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Temuan konseptual tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu perlu didukung oleh pembagian tanggung jawab yang jelas dan kerja sama antarpihak. Keterlibatan tenaga pendidik juga perlu disertai dukungan organisasi berupa pengembangan kompetensi, penyediaan fasilitas, dan penghargaan terhadap kontribusi yang diberikan.

Tabel 4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Implementasi MMT

No.	Pemangku Kepentingan	Bentuk Keterlibatan	Indikator yang Dapat Dievaluasi
1	Kepala madrasah atau pimpinan pesantren	Menetapkan kebijakan, sasaran mutu, dan koordinasi program	Keterlaksanaan program dan tindak lanjut evaluasi
2	Guru atau ustaz	Menyusun pembelajaran, melakukan asesmen, dan mengembangkan metode mengajar	Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran
3	Tenaga kependidikan	Mengelola administrasi, data peserta didik, dan layanan kelembagaan	Ketepatan data dan efektivitas layanan
4	Peserta didik atau santri	Mengikuti pembelajaran, mematuhi tata tertib, dan memberikan umpan balik	Partisipasi belajar dan perkembangan kompetensi
5	Orang tua atau wali	Mendukung proses belajar dan berkomunikasi dengan lembaga	Keterlibatan dalam komunikasi dan program pendampingan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

6	Komite dan masyarakat	Memberikan masukan serta mendukung pengembangan program	Kualitas partisipasi dan relevansi masukan
7	Tim penjaminan mutu	Memantau indikator, mengumpulkan data, dan mengevaluasi program	Kelengkapan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan

Sumber: Sintesis berdasarkan Sallis (2002) dan Tripitasari et al. (2023).

Tabel 4 menunjukkan bahwa peningkatan mutu membutuhkan pembagian peran yang saling melengkapi. Guru, misalnya, dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, sedangkan pimpinan menyediakan dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasinya. Tenaga kependidikan memastikan bahwa data akademik dan administrasi tersedia secara akurat, sementara orang tua memberikan informasi mengenai perkembangan peserta didik di luar lingkungan sekolah.

Keterlibatan orang tua juga perlu dipahami sebagai kemitraan, bukan hanya partisipasi dalam kegiatan seremonial atau pertemuan rutin. Lembaga dapat mengembangkan komunikasi mengenai perkembangan belajar, kedisiplinan, pembentukan karakter, dan kebutuhan pendampingan peserta didik. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyesuaikan program pendidikan.

Namun, keterlibatan seluruh unsur organisasi tidak otomatis menghasilkan peningkatan mutu apabila tidak didukung koordinasi yang efektif. Karena itu, lembaga perlu menetapkan mekanisme komunikasi, jadwal evaluasi, pembagian tugas, dan prosedur penyelesaian masalah. Dengan mekanisme tersebut, partisipasi dapat berkembang menjadi kerja sama yang terarah dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran mutu.

Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Layanan Pendidikan

Mutu pendidikan merupakan hasil dari berbagai proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penerapan MMT perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus perbaikan layanan kelembagaan. Peningkatan mutu pembelajaran dapat dilakukan melalui perencanaan pembelajaran yang lebih baik, pengembangan kompetensi guru, penggunaan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta evaluasi hasil belajar. Pada saat yang sama, kualitas layanan dapat ditingkatkan melalui pembenahan administrasi, penyediaan fasilitas, perbaikan komunikasi, dan pengelolaan informasi pendidikan.

Zohriah et al. (2024) menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan yang berlandaskan standar mutu lembaga. Prinsip tersebut mengisyaratkan bahwa program peningkatan mutu perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi aktual, bukan sekadar meniru praktik lembaga lain. Sementara itu, Syarifah (2020) menekankan pentingnya orientasi mutu dalam pengelolaan pesantren dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam.

Tabel 5. Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Layanan Pendidikan

No.	Bidang	Strategi Peningkatan Mutu	Indikator Keberhasilan
1	Kurikulum	Meninjau kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik	Kesesuaian program pembelajaran dengan tujuan yang ditetapkan
2	Proses pembelajaran	Mengembangkan metode pembelajaran aktif, kontekstual, dan partisipatif	Keterlibatan peserta didik dan pencapaian tujuan pembelajaran
3	Kompetensi guru	Melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi profesional	Peningkatan kompetensi dan kualitas praktik mengajar
4	Asesmen	Menggunakan hasil asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar	Tersedianya tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi
5	Sarana dan prasarana	Memetakan kebutuhan fasilitas dan menyusun prioritas pengadaan	Ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan pembelajaran
6	Administrasi	Menyusun prosedur kerja dan memperbaiki pengelolaan data	Ketepatan, kelengkapan, dan keteraturan administrasi
7	Pembinaan karakter	Mengintegrasikan nilai keislaman dalam kegiatan akademik dan keseharian	Terlaksananya pembinaan karakter yang konsisten
8	Layanan pemangku kepentingan	Mengembangkan mekanisme komunikasi dan penanganan keluhan	Kecepatan tindak lanjut dan kualitas pelayanan

Sumber: Sintesis berdasarkan Sallis (2002), Syarifah (2020), dan Zohriah et al. (2024).

Tabel 5 menunjukkan bahwa peningkatan mutu perlu dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan kurikulum, misalnya, tidak akan memberikan hasil optimal apabila guru belum memperoleh dukungan untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai. Demikian pula, pengadaan sarana dan prasarana perlu didasarkan pada kebutuhan pembelajaran agar penggunaan anggaran memberikan manfaat yang jelas.

Dalam pendidikan Islam, strategi peningkatan mutu juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kompetensi akademik dan pembentukan karakter. Program pembelajaran dapat mengintegrasikan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian ke dalam aktivitas akademik maupun kegiatan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

keseharian. Integrasi tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten agar nilai-nilai keislaman tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga tercermin dalam budaya lembaga.

Di samping itu, lembaga perlu mengembangkan mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti masukan dari peserta didik serta orang tua. Masukan dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan layanan, seperti kesulitan memperoleh informasi akademik, ketidaksesuaian jadwal, atau kebutuhan pendampingan belajar. Setiap masukan perlu dianalisis berdasarkan urgensi dan kemungkinan penyelesaiannya, kemudian diikuti dengan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Dengan demikian, strategi peningkatan mutu sebaiknya dirancang berdasarkan prioritas, dilaksanakan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, serta dievaluasi menggunakan indikator yang relevan. Pendekatan tersebut membantu lembaga menghubungkan kebijakan mutu dengan perbaikan nyata dalam proses pendidikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi MMT

Penerapan MMT tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan konsep dan prosedur, tetapi juga oleh kondisi organisasi tempat pendekatan tersebut diterapkan. Komitmen pimpinan, kompetensi tenaga pendidik, kerja sama antaranggota, ketersediaan data, dan dukungan pemangku kepentingan dapat mendukung keberhasilan program. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, kurangnya pemahaman mengenai MMT, dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat pelaksanaan program peningkatan mutu.

Erliyanto dan Supriyono (2024) membahas tantangan implementasi TQM pada lembaga pendidikan Islam, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, budaya organisasi, infrastruktur, dan anggaran. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan MMT memerlukan kesiapan organisasi dan dukungan yang memadai. Namun, tingkat pengaruh setiap faktor dapat berbeda berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing lembaga.

Tabel 6. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi MMT

No.	Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Penanganan
1	Kepemimpinan	Komitmen pimpinan terhadap peningkatan mutu	Kebijakan tidak konsisten dan lemahnya pengawasan	Menetapkan sasaran mutu dan mengevaluasi pelaksanaannya
2	Sumber daya manusia	Guru kompeten dan budaya kerja kolaboratif	Keterbatasan kompetensi dan rendahnya partisipasi	Menyediakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan
3	Keuangan	Perencanaan anggaran berbasis prioritas	Keterbatasan dana operasional	Menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan dan dampak
4	Sarana dan prasarana	Fasilitas yang mendukung proses belajar	Fasilitas belum memadai	Melakukan pemetaan kebutuhan dan pengadaan bertahap
5	Budaya organisasi	Keterbukaan terhadap evaluasi dan perubahan	Resistensi terhadap kebijakan baru	Melibatkan anggota sejak tahap perencanaan
6	Sistem informasi	Data akademik dan administrasi yang akurat	Data tidak lengkap atau tidak dimanfaatkan	Menetapkan prosedur pencatatan dan pemantauan data
7	Partisipasi pemangku kepentingan	Komunikasi aktif dengan orang tua dan masyarakat	Kurangnya komunikasi dan kepercayaan	Mengembangkan saluran komunikasi dan umpan balik
8	Evaluasi mutu	Indikator yang jelas dan tindak lanjut terencana	Evaluasi hanya berfokus pada dokumen	Menghubungkan hasil evaluasi dengan tindakan korektif

Sumber: Sintesis berdasarkan Sallis (2002), Erliyanto dan Supriyono (2024), serta Tripitasari et al. (2023).

Berdasarkan Tabel 6, salah satu tantangan utama penerapan MMT adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Lembaga dapat memiliki dokumen standar mutu yang lengkap, tetapi pelaksanaan program belum tentu berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Kondisi ini dapat terjadi ketika anggota organisasi belum memahami tujuan kebijakan, tidak memperoleh dukungan yang memadai, atau menganggap evaluasi sebagai kegiatan administratif semata.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pimpinan perlu memastikan bahwa setiap program mutu memiliki tujuan yang jelas, penanggung jawab, sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan indikator evaluasi. Program juga perlu disosialisasikan kepada pihak yang terlibat agar seluruh anggota memahami alasan perubahan dan manfaat yang ingin dicapai.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Keterbatasan anggaran perlu ditangani melalui penentuan prioritas. Lembaga tidak harus melaksanakan seluruh program peningkatan mutu sekaligus, tetapi dapat memulai dari permasalahan yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, peningkatan kompetensi guru atau perbaikan fasilitas pembelajaran yang paling dibutuhkan dapat diprioritaskan sebelum melaksanakan program tambahan lainnya.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi mutu. Lembaga tetap dapat memanfaatkan rapat koordinasi, diskusi antarguru, evaluasi hasil belajar, dan umpan balik orang tua sebagai sumber informasi untuk perbaikan. Dengan pengelolaan yang tepat, keterbatasan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani melalui langkah yang realistis.

Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan Implementasi MMT

Evaluasi merupakan bagian penting dalam MMT karena keberhasilan peningkatan mutu perlu dinilai berdasarkan indikator yang jelas. Tanpa evaluasi, lembaga akan mengalami kesulitan menentukan apakah program yang dilaksanakan telah memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan kondisi aktual sehingga perbaikan dapat direncanakan secara lebih terarah.

Sallis (2002) menempatkan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sebagai unsur penting dalam pengelolaan mutu pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, evaluasi perlu mencakup proses pembelajaran, perkembangan kompetensi peserta didik, kualitas layanan, kinerja organisasi, serta pelaksanaan pembinaan karakter. Pengukuran tersebut tidak hanya bertujuan mengetahui capaian, tetapi juga menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menyusun tindakan perbaikan.

Tabel 7. Indikator Evaluasi Keberhasilan Implementasi MMT

No.	Dimensi Mutu	Indikator	Sumber Data yang Dapat Digunakan	Frekuensi Evaluasi yang Disarankan
1	Mutu pembelajaran	Ketercapaian tujuan pembelajaran dan perkembangan hasil belajar	Hasil asesmen dan dokumen pembelajaran	Setiap akhir unit atau periode pembelajaran
2	Kompetensi pendidik	Partisipasi dalam pengembangan profesional dan peningkatan praktik mengajar	Dokumen pelatihan dan hasil supervisi	Setiap semester
3	Layanan pendidikan	Ketepatan dan kualitas pelayanan administrasi	Catatan layanan dan umpan balik pengguna	Bulanan atau per semester
4	Kepemimpinan dan tata kelola	Keterlaksanaan program dan tindak lanjut keputusan	Rencana kerja, notulen, dan laporan evaluasi	Setiap bulan atau triwulan
5	Sarana dan prasarana	Ketersediaan dan kelayakan fasilitas pembelajaran	Inventarisasi dan laporan pemeriksaan fasilitas	Setiap semester
6	Budaya organisasi	Partisipasi, kedisiplinan, dan kerja sama	Observasi, dokumentasi, dan evaluasi internal	Secara berkala
7	Pembinaan karakter	Pelaksanaan program pembinaan dan perkembangan perilaku peserta didik	Catatan pembinaan dan observasi pendidik	Secara berkala
8	Kepuasan pemangku kepentingan	Penilaian peserta didik dan orang tua terhadap layanan	Kuesioner, wawancara, dan pengaduan	Setiap semester
9	Perbaikan berkelanjutan	Persentase atau proporsi rekomendasi evaluasi yang telah ditindaklanjuti	Catatan evaluasi dan laporan tindak lanjut	Setiap periode evaluasi

Sumber: Sintesis berdasarkan Sallis (2002) dan Snyder (2019). Indikator dan frekuensi merupakan usulan operasional yang perlu disesuaikan dengan kondisi lembaga.

Tabel 7 menunjukkan bahwa keberhasilan MMT perlu dinilai melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan. Indikator akademik digunakan untuk melihat perkembangan proses dan hasil pembelajaran, sedangkan indikator layanan membantu menilai efektivitas pengelolaan administrasi dan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Indikator tata kelola digunakan untuk menilai konsistensi pelaksanaan program, sementara indikator budaya organisasi membantu melihat apakah prinsip mutu telah menjadi bagian dari kebiasaan kerja.

Pengukuran perlu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan sumber data yang sesuai. Hasil asesmen, misalnya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi materi yang belum dikuasai peserta didik. Data

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

tersebut kemudian menjadi dasar bagi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran atau memberikan pendampingan tambahan. Demikian pula, hasil evaluasi layanan administrasi dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur pelayanan dan komunikasi dengan orang tua.

Dalam pengukuran keberhasilan, lembaga juga perlu membedakan antara indikator pelaksanaan dan indikator hasil. Indikator pelaksanaan menunjukkan apakah suatu kegiatan telah dilakukan, sedangkan indikator hasil menunjukkan perubahan yang terjadi setelah kegiatan dilaksanakan. Jumlah pelatihan guru, misalnya, merupakan indikator pelaksanaan, sedangkan perubahan kualitas praktik mengajar dan perkembangan hasil belajar merupakan indikator hasil yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Oleh karena itu, evaluasi MMT sebaiknya tidak hanya menghitung jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan, tetapi juga menilai relevansi kegiatan tersebut terhadap peningkatan mutu. Hasil evaluasi perlu didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penyusunan program berikutnya agar proses peningkatan mutu berlangsung secara terukur dan berkelanjutan.

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen Mutu Terpadu

Integrasi nilai-nilai Islam merupakan unsur penting yang membedakan penerapan MMT pada lembaga pendidikan Islam dari penerapan manajemen mutu yang hanya berorientasi pada efisiensi organisasi. Dalam pendidikan Islam, mutu perlu dikembangkan sejalan dengan tujuan pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai keislaman perlu diterapkan dalam kepemimpinan, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya, pelayanan, serta evaluasi kelembagaan.

Syarifah (2020) menjelaskan bahwa penerapan TQM di pesantren dapat diarahkan pada kepuasan pemangku kepentingan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Perspektif ini menunjukkan bahwa orientasi pada kualitas layanan tidak bertentangan dengan identitas keislaman selama dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tanggung jawab moral lembaga.

Tabel 8. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Implementasi MMT

No.	Nilai Islam	Penerapan dalam Manajemen	Relevansi terhadap Mutu Pendidikan
1	Amanah	Menjalankan tugas, mengelola anggaran, dan menggunakan fasilitas secara bertanggung jawab	Memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan
2	Itqan atau bekerja secara sungguh-sungguh dan cermat	Melaksanakan tugas secara profesional dan memperhatikan kualitas hasil	Mendorong ketelitian dan konsistensi kerja
3	Ihsan	Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan perbaikan	Mendorong upaya memberikan hasil terbaik
4	Adil	Memberikan layanan dan kesempatan belajar secara proporsional	Mendukung layanan pendidikan yang adil
5	Syura atau musyawarah	Melibatkan pihak terkait dalam pembahasan kebijakan dan evaluasi	Memperkuat partisipasi dan komunikasi
6	Kejujuran	Menyampaikan hasil evaluasi secara objektif dan tidak memanipulasi data	Meningkatkan kredibilitas informasi
7	Tanggung jawab	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan memenuhi kewajiban kelembagaan	Memperkuat konsistensi pelaksanaan program

Sumber: Sintesis konseptual berdasarkan Syarifah (2020), Sallis (2002), dan prinsip nilai-nilai Islam dalam pengelolaan pendidikan.

Tabel 8 memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara konkret dalam sistem manajemen mutu. Amanah, misalnya, dapat diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang transparan, penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan. Kejujuran dapat diterapkan melalui penyampaian hasil evaluasi secara objektif, termasuk ketika capaian program belum sesuai dengan target yang ditentukan.

Nilai musyawarah dapat menjadi dasar pelibatan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, lembaga dapat memperoleh perspektif yang lebih beragam sebelum menetapkan program perbaikan. Namun, musyawarah tetap perlu disertai pembagian tanggung jawab dan tindak lanjut yang jelas agar keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.

Nilai ihsan dan itqan juga relevan dengan budaya peningkatan mutu. Keduanya dapat menjadi landasan etis bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, teliti, dan berorientasi pada kualitas. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui persiapan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pembelajaran yang baik, evaluasi yang jujur, pelayanan yang bertanggung jawab, serta kesediaan memperbaiki kekurangan.

Integrasi nilai Islam dengan MMT perlu menghindari pendekatan simbolis yang hanya mencantumkan istilah keagamaan dalam dokumen kebijakan. Nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan menjadi perilaku, prosedur, dan standar kerja yang dapat diamati. Dengan demikian, identitas keislaman menjadi bagian dari budaya mutu yang mendasari pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Sintesis Hasil Penelitian dan Model Konseptual Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Sintesis dari berbagai tema yang telah dibahas menunjukkan bahwa implementasi MMT dalam lembaga pendidikan Islam melibatkan hubungan antara kepemimpinan, sumber daya manusia, proses pembelajaran, evaluasi, dan nilai-nilai keislaman. Setiap unsur memiliki peran yang berbeda, tetapi seluruhnya diarahkan pada pencapaian tujuan mutu yang sama. Kepemimpinan menetapkan arah dan kebijakan, sumber daya manusia melaksanakan program, sistem evaluasi menyediakan informasi mengenai capaian, sedangkan nilai-nilai Islam memberikan landasan etis bagi seluruh proses pengelolaan.

Tripitasari et al. (2023) menekankan pentingnya kerja sama dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam, sedangkan Zohriah et al. (2024) menyoroti perbaikan berkelanjutan yang berlandaskan standar mutu. Sementara itu, Syarifah (2020) menekankan keterkaitan pengelolaan mutu dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pesantren. Jika disintesiskan, ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu memerlukan sistem kerja yang terkoordinasi, evaluasi yang konsisten, dan orientasi nilai yang sesuai dengan karakteristik lembaga.

Tabel 9. Sintesis Temuan dan Implikasinya bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

No.	Tema Utama	Sintesis Hasil Kajian	Implikasi bagi Lembaga Pendidikan Islam
1	Kepemimpinan mutu	Peningkatan mutu memerlukan arah, komitmen, dan koordinasi yang jelas	Pimpinan perlu menetapkan sasaran mutu dan memastikan tindak lanjutnya
2	Keterlibatan sumber daya manusia	Kerja sama dan pemberdayaan anggota mendukung pelaksanaan program mutu	Lembaga perlu membangun budaya kerja kolaboratif
3	Peningkatan kualitas pembelajaran	Mutu perlu diterjemahkan menjadi perbaikan proses dan hasil pembelajaran	Guru perlu menggunakan evaluasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran
4	Standar dan evaluasi	Pengukuran mutu diperlukan untuk mengetahui capaian dan kesenjangan	Lembaga perlu menetapkan indikator serta prosedur evaluasi
5	Perbaikan berkelanjutan	Hasil evaluasi perlu menjadi dasar tindakan korektif dan pengembangan program	Rekomendasi evaluasi harus memiliki penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut
6	Dukungan sumber daya	Ketersediaan sumber daya memengaruhi kelayakan pelaksanaan program	Anggaran dan fasilitas perlu disesuaikan dengan prioritas mutu
7	Integrasi nilai Islam	Pengelolaan mutu perlu selaras dengan tujuan dan identitas pendidikan Islam	Nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan akhlak perlu diterapkan dalam tata kelola
8	Kemitraan pemangku kepentingan	Umpan balik membantu lembaga memahami kebutuhan layanan	Lembaga perlu mengembangkan komunikasi dan evaluasi layanan secara berkala

Sumber: Sintesis berdasarkan Sallis (2002), Syarifah (2020), Tripitasari et al. (2023), Erliyanto dan Supriyono (2024), serta Zohriah et al. (2024).

Tabel 9 memperlihatkan bahwa peningkatan mutu tidak dapat bergantung pada satu program atau satu aktor. Pelatihan guru, misalnya, akan lebih efektif apabila disertai dukungan pimpinan, fasilitas pembelajaran, evaluasi hasil, dan tindak lanjut. Demikian pula, penetapan standar mutu tidak akan memberikan perubahan berarti apabila tidak diikuti pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan.

Berdasarkan sintesis tersebut, model konseptual peningkatan mutu pendidikan Islam dapat disusun melalui hubungan antara landasan nilai, tata kelola, proses pendidikan, evaluasi, dan hasil yang diharapkan.

Model konseptual pada Gambar 2 menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam menjadi landasan etis yang memengaruhi cara lembaga merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan. Landasan tersebut diterjemahkan ke dalam tata kelola mutu melalui kepemimpinan, penetapan standar, pembagian tanggung jawab, dan keterlibatan seluruh unsur organisasi.

Tata kelola kemudian diwujudkan melalui proses pendidikan yang mencakup pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, administrasi, pengelolaan sarana, dan layanan kepada peserta didik. Proses tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan mengidentifikasi masalah yang

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

membutuhkan perbaikan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan tindakan korektif dan pengembangan program.

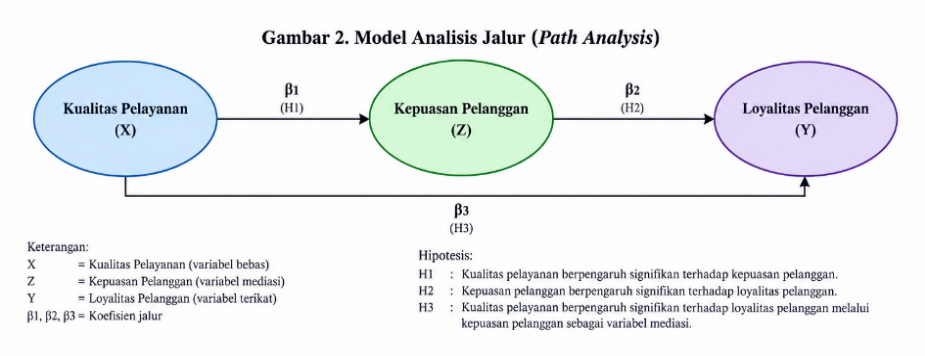

Gambar 2. Model Konseptual Implementasi MMT untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam
Sumber: Model konseptual hasil sintesis literatur berdasarkan Sallis (2002), Syarifah (2020), Tripitasari et al. (2023), dan Zohriah et al. (2024).

Hasil yang diharapkan dari penerapan model tersebut meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, perbaikan layanan pendidikan, penguatan akuntabilitas tata kelola, serta pembentukan karakter peserta didik. Akan tetapi, hubungan tersebut merupakan kerangka konseptual yang diturunkan dari sintesis literatur, bukan hubungan sebab-akibat yang telah dibuktikan melalui pengujian empiris dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi MMT dapat digunakan sebagai kerangka pengelolaan untuk membantu lembaga pendidikan Islam membangun sistem peningkatan mutu yang terarah. Keberhasilannya memerlukan konsistensi kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi berbasis data, dan integrasi nilai-nilai Islam. Dengan menghubungkan unsur-unsur tersebut dalam siklus perbaikan berkelanjutan, lembaga memiliki landasan yang lebih sistematis untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan menentukan prioritas pengembangan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) pada lembaga pendidikan Islam merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan yang terarah, keterlibatan seluruh warga lembaga, penguatan kepemimpinan, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penerapannya perlu berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti amanah, tanggung jawab, keadilan, disiplin, dan kerja sama, sehingga peningkatan mutu tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik dan kepuasan pemangku kepentingan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Keberhasilan MMT memerlukan komitmen pimpinan, budaya kerja yang mendukung mutu, komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, MMT dapat menjadi kerangka pengelolaan yang relevan bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam, meskipun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap lembaga. Karena kajian ini menggunakan studi pustaka, penerapan dan efektivitasnya tetap perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

DAFTAR REFERENSI

Amin, N., Siswanto, F., & Hakim, L. (2018). Membangun budaya mutu yang unggul dalam organisasi lembaga pendidikan Islam. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(1), 94–106. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.308

Aisyah, S., & Suban, A. (2026). Unsur-unsur Total Quality Management (TQM) dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(2), 25–34. https://doi.org/10.51700/attadbir.v6i2.1768

Jami, D., & Muharam, A. (2022). Strategy for improving the quality of Islamic religious education study programs with Total Quality Management. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(2), 267–283. https://doi.org/10.31538/ndh.v7i2.2096

Lubaba, A., Pratama, G., & Ramadhani, M. A. (2022). Manajemen mutu terpadu berbasis maqashid syariah di lembaga pendidikan Islam. Eduvis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(1).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

https://doi.org/10.47453/eduvis.v7i1.4226
Nidzom, M. F., Pambudi, D. S., & Mahmud, R. A. (2022). Integrated quality management and a critical review of its application in educational institutions. At-Ta'dib. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v17i1.108
Sallis, E. (2002). Total quality management in education (3rd ed.). Routledge. https://www.routledge.com/Total-Quality-Management-in-Education/Sallis/p/book/9780749437961
Septiadi, W. (2019). Tinjauan Total Quality Management (TQM) pada lembaga pendidikan Islam. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1). https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.105
Siregar, A. S. (2024). Pengembangan manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan Islam. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3), 8610–8626. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11169
Solikhin, M., & Suwadi. (2022). The concept of integrated quality management applicative studies. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(3). https://doi.org/10.31538/ndh.v7i3.2372
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Syarifah, L. S. (2020). Implementasi Total Quality Management (TQM) di pesantren? Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 30(1), 93–112. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.33
Tobroni, Risman, K., Faridi, & Saefullah, A. (2025). Beyond technocratic quality: Toward an Islamic TQM model for holistic educational management. JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(1). https://doi.org/10.33650/jumpa.v6i1.10522
Tripitasari, D., Mispani, M., Ikhwan Aziz Q., Ikhwanuddin, I., Zarnuji, A., & Wicaksono, Y. (2023). Peningkatan manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan Islam. Indonesian Journal of Educational Management and Leadership, 1(1), 71–84. https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i1.506
Zahra, D. N. (2025). Quality-oriented Islamic education management: Implementation of Total Quality Management in Islamic educational institutions. JISEI: Journal of Islamic Studies and Educational Innovation, 1(4). https://doi.org/10.61094/jisei.v1i4.4
Zohriah, A., Adnan, A., Firdaos, R., & Nafis Badri, M. S. M. (2023). Implementasi Total Quality Manajemen (TQM) dalam lembaga pendidikan Islam. Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management, 4(1), 295–301. https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.4073